

DAFTAR PUSTAKA

- AL Ismi, R Jayanuarto, HS Putra, M Ardinata. 2025. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022*. *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 19 (1), 102-115
- Alpino Apriyanto Siahaan, dkk, “*Analisis yuridis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang lintas negara (Studi Putusan Nomor 807 /Pid.Sus /2019/PN .Jkt.Tim)*”, (*Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4 No.3, September 2022), h., 2.
- Wibawa, J. M. C., Jayanuarto, R., Hangabei, S. M., & Putra, H. S. (2025). Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 7(1), 39-54.
- Sinling, Y. M., & Jayanuarto, R. *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kepolisian Resor Kepahiang Tahun 2022*.
- Alpino Apriyanto Siahaan, Muhammad Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi, “*Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim)*,” *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 3 (December 3, 2022): 1–16, <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i3.220>.
- AT Afriko, SM Hangabei, RT Mayasari, JT Pareke 2026. *Analisis pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan pidana pelecehan seksual anak oleh pendidik*. - *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Bareskrim Polri. (2023). *Laporan Tahunan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Bareskrim Polri.
- Chandra, M. B., & Jamaludin, A. (2025). *Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan di situs judi online di luar*

- negeri. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12), 1–22 (p. 1).
rewangrencang.com (p. 1)
- Dinamika Hukum*, 23(1), 33-48. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3821>.
- Febrianti, A., & Noor, M. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Geraldly Imanuel Pangkey, Noldy Mohede, Herry Tuwaidan. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Pekerja Warga Sulawesi Utara*. Artikel Skripsi. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. 2023.
- Hapsari, R., & Subekti, R. (2024). *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyidik Polda Bengkulu*. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bengkulu*, 7(1), 88-104.
- Hartono, S. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- <https://indonesia.iom.int/id/news/hari-dunia-anti-perdagangan-orang-2024-menciptakan-lingkungan-migrasi-yang-aman-untuk-melawan-perdagangan-orang>
- <https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/bareskrim-polri-catat-ada-36-ribu-kasus-berbasis-gender-sepanjang-2025-92685>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/>
- International Labour Organization (ILO). (2022). *Laporan Global Trafficking in Persons 2022*. Geneva: ILO.
- Kadek Febytara Dewi Tiaksa Pande, “Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana Malang Kota”, (*Dialektika*, Vol. 14, No. 1, 2019), h., 15.
- Kusumawati, D. (2024). *Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera*. Palembang: Penerbit Unsri Press.
- Lukman Hakim Harahap, dkk, “Aspek hukum pembuktian dalam kasus tindak pidana perdagangan orang”, (*Journal of Law, Administration, and Social Science* Vol. 4, No.6, 2024), h., 1029.
- Mutiara, S., & Bachtiar, M. (2022). *Kendala Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(1), 45-67.

- Nuripansah, Kusuma, J. D., & Susilawati, I. Y. (2023). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (Studi di Wilayah Polres Lombok Tengah)*. Unizar Recht Journal, 2(4).
- Pangkey, G. I. (2025). Analisis yuridis tindak pidana perdagangan orang (studi kasus pekerja warga Sulawesi Utara). *Lex Crimen*, 14(1). unsrat.ac.id
- Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III mataram”, (Unizar Recht Journal, Vol.2 No 2, Juli 2023), h., 312.
- perdagangan orang (Human Trafficking) yang dilakukan oleh perempuan (studi kasus di lembaga
- PTPPO, PTPPO. 2007. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan.” UU PTPPO 46(3): 171–74.
- Rahayu, P. S., & Susilo, D. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2007*. Jurnal
- Santoso, B., & Nugroho, A. (2021). *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Anti Perdagangan Orang di Tingkat Polres: Studi Kasus di Jawa Tengah*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(3), 509-530.
- Siburian, R. J. (2021). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Internasional*. Medan: USU Press.
- Silaban, L C. 2023. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau).” : 1–114.
- Silaban, L C. 2023. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau).” : 1–114.
- Sitinjak, Y. E. A. A. B. 2023. *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasiseksual*. Universitas Medan Area. Skripsi. Halaman 1.

- Soekanto, S. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan ke-15*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.
- Tasa Titi Hapsari, dkk “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indoneia*”, *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 30 No. 1, 2024, hlm. 9463*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Wahid, A., & Irfan, M. (2022). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Yuliana Plantika, “Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota”, (*Dialektika*, Vol. 14, No. 1, 2019), h., 14.
- Panjaitan, J. S. B., Marlina, & Zulyadi, R. (2021). *Analisis hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1136–1153. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.852>
- Silaban, L,C. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)*. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Hlm. 74.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : *Politeia*, hal. 21.

L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul:

**TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK SATRESKRIM
POLRES SELUMA**

A. Identitas Responden

1. Nama : Aipda Meky Ronandar, S.H
2. Jabatan : KANIT PPA
3. Lama bekerja : 11 Tahun
4. Unit kerja : SATRESKRIM POLRES SELUMA

B. Pertanyaan

Penerapan UU No. 21 Tahun 2007

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO?
2. Bagaimana prosedur penyidikan kasus TPPO di Polres Seluma?
3. Apakah dalam praktik penyidikan sudah sepenuhnya mengacu pada UU No. 21 Tahun 2007?
4. Bagaimana cara penyidik mengidentifikasi suatu kasus termasuk TPPO atau bukan?
5. Apa saja tahapan penyidikan dalam kasus TPPO yang biasanya dilakukan?
6. Bagaimana penerapan unsur-unsur TPPO dalam proses penyidikan?
7. Apakah terdapat perbedaan penanganan antara TPPO dengan tindak pidana umum lainnya?

8. Bagaimana koordinasi dengan instansi lain (kejaksaan, dinas sosial, dll) dalam penanganan kasus TPPO?
9. Bagaimana perlindungan terhadap korban selama proses penyidikan?
10. Apakah pernah terjadi perbedaan pandangan antara penyidik dan jaksa/hakim terkait penerapan pasal TPPO? Jelaskan

C. Pertanyaan Pendukung

Faktor Penghambat dan Upaya mengatasi hambatan tersebut

11. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyidikan kasus TPPO?
12. Apakah keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan?
13. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam mendukung penyidikan?
14. Apakah ada kendala dalam pembuktian unsur TPPO?
15. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus TPPO?
16. Bagaimana pengaruh faktor budaya atau lingkungan terhadap penanganan kasus?
17. Apakah pelatihan atau pendidikan khusus bagi penyidik sudah memadai?

D. (Pendalaman)

18. Menurut Bapak/Ibu, apakah UU No. 21 Tahun 2007 sudah efektif diterapkan?
19. Apa yang perlu diperbaiki dalam penerapan UU tersebut?
20. Apakah perlu adanya regulasi tambahan atau revisi undang-undang?